



## POLICY BRIEF

# Membangun Proteksi Industri dan Diversifikasi Pasar Sebagai Respons Tarif Resiprokal Trump

### Penulis

**LUTHFIAN HAEKAL**  
Human Rights Manager

### Layout & Desain

**FAIRUZ MAHDIYYAH**  
Communication Officer

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sejak 2025 lalu memperlihatkan kerentanan struktural sektor perikanan Indonesia dalam rantai nilai global. Sebagai salah satu tujuan ekspor terbesar, Amerika Serikat berfungsi sebagai penentu nilai global yang membentuk standar harga, mutu, dan spesifikasi komoditas Indonesia. Ketika tarif Trump diberlakukan, tekanan tersebut tidak hanya menurunkan margin ekspor, tetapi juga mengunci industri dalam ketergantungan nilai yang membuat daya tawar Indonesia melemah.

Berdasarkan hal tersebut, *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia melakukan survei terbatas terhadap pelaku usaha, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk melihat dampak tarif Trump terhadap ekonomi perikanan di Indonesia. Terdapat tiga temuan survei, yaitu:

### 1 Ketergantungan nilai pada pasar Amerika Serikat

Nilai per ton ke Amerika Serikat merupakan yang tertinggi, sehingga standar harga, mutu, dan spesifikasi dibentuk oleh pasar Amerika Serikat. Ketergantungan tersebut membuat industri domestik tidak memiliki ruang untuk menentukan nilai secara mandiri.

### 2 Transmisi risiko kepada Industri dan pekerja

Lemahnya daya beli domestik membuat produk ekspor tidak mungkin diserap oleh pasar domestik. Kondisi tersebut mencegah substitusi impor yang berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi guncangan di pasar global.

### 3 Rendahnya kapasitas pasar domestik untuk menyerap produk bernilai ekspor

Kenaikan tarif langsung menurunkan produksi dan memicu PHK karena industri berorientasi ekspor menjadikan tenaga kerja sebagai variabel penyesuaian utama. Hal tersebut muncul sebagai konsekuensi kebijakan global yang langsung ditanggung oleh industri dan pekerja tanpa mekanisme perlindungan memadai.

Terdapat tiga rekomendasi yang ditawarkan, yaitu:

### 1 Memperluas dan mempercepat diversifikasi pasar ekspor

Indonesia perlu lebih memperkuat jalur perjanjian antar negara ke pasar tujuan seperti Tiongkok, ASEAN, Uni Eropa, Timur Tengah, BRICS, serta memanfaatkan tarif 0% ke Jepang untuk mengurangi konsentrasi risiko pasar tunggal.

### 2 Menyusun skema proteksi industri dan pekerja selama shock tarif

Pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal terarah, mekanisme subsidi upah, serta sistem deteksi dini kontraksi produksi. Skema tersebut memastikan risiko eksternal tidak sepenuhnya ditransfer ke pekerja.

### 3 Memperkuat resiliensi ekonomi jangka panjang melalui substitusi impor dan peningkatan daya beli domestik

Peningkatan pendapatan riil diperlukan agar pasar domestik dapat menjadi penyangga nilai. Tanpa penguatan konsumsi nasional, industri akan tetap terkunci dalam ketergantungan pasar global.

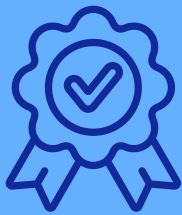


002/PB/DFW-INDONESIA/II/2026

# HASIL SURVEI DFW INDONESIA: Dampak Tarif Trump terhadap Ekonomi Perikanan di Indonesia

Tarif resiprokal 10% yang diberlakukan Amerika Serikat pada April 2025 lalu memberikan tekanan signifikan terhadap sektor perikanan Indonesia. Sejumlah perusahaan pengolahan tuna loin yang berorientasi ekspor ke pasar Amerika Serikat menghentikan produksinya. Mengingat Amerika Serikat merupakan tujuan utama ekspor perikanan dengan nilai FOB paling tinggi, kebijakan tarif resiprokal berimplikasi terhadap ekonomi perikanan nasional. Oleh karenanya, DFW Indonesia melaksanakan survei terbatas pada 22 Juli-6 Agustus 2025 untuk mengidentifikasi dampak tarif terhadap sektor perikanan Indonesia.

## HASIL TEMUAN



### Ketergantungan Terhadap Pasar Amerika Serikat

sebagai negara dengan nilai ton paling tinggi, maka standar, harga, dan mutu yang ada saat ini masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.



### Domino Tarif Naik Terhadap Proteksi Industri dan Pekerja

ketika kenaikan tarif diterapkan, hal paling pertama yang disesuaikan oleh industri adalah menurunkan jumlah produksi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).



### Produk Ekspor Melimpah, Daya Beli Domestik Melemah

Daya beli domestik saat ini sangat lemah untuk bisa mengantisipasi banyaknya produk ekspor di pasaran.

## REKOMENDASI



### Memperluas Diversifikasi Pasar Ekspor

Indonesia perlu lebih memperkuat jalur perjanjian antar negara ke pasar tujuan seperti Tiongkok, ASEAN, Uni Eropa, Timur Tengah, BRICS, serta memanfaatkan tarif 0% ke Jepang untuk mengurangi konsentrasi risiko pasar tunggal.



### Penyusunan Skema Proteksi Industri dan Pekerja

Pemerintah perlu menyediakan insentif fiskal terarah, mekanisme subsidi upah, serta sistem deteksi dini kontraksi produksi.



### Perkuat Resiliensi Ekonomi Jangka Panjang

Peningkatan pendapatan riil diperlukan agar pasar domestik mampu menjadi penyangga nilai dan tidak terus bergantung pada pasar global.

# LATAR BELAKANG

Kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada 2025 memperlihatkan kerentanan struktural sektor perikanan Indonesia dalam rantai nilai global. Sebagai tujuan utama ekspor dengan menyerap sekitar 32% total ekspor perikanan dan 56,2% komoditas udang, Amerika Serikat memiliki posisi tawar yang secara langsung membentuk nilai *Free on Board (FOB)*<sup>1</sup> produk Indonesia. Dengan nilai per ton tertinggi dibanding negara pasar tujuan lainnya, Amerika Serikat berfungsi sebagai penentu nilai global. Akibatnya, ketika Tarif Trump ditekan, menaikkan hambatan masuk bagi produk perikanan. Dalam kerangka tersebut, Indonesia tidak memiliki ruang menentukan harga atau standar, karena nilai komoditas domestik dibuat oleh pasar eksternal dengan kemampuan yang lebih besar.

Kebijakan tarif Trump juga memperluas cakupan proteksionisme terhadap komoditas makanan laut (*seafood*) dari negara dengan industri berbasis ekspor (*export-oriented industry/EOI*)<sup>2</sup>. Dalam industri tersebut, tenaga kerja cenderung dijadikan sebagai *shock absorber* ketika fluktuasi eksternal terjadi. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah tarif diberlakukan. Kondisi tersebut menunjukkan konsekuensi kebijakan global ditransmisikan langsung kepada pekerja tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Tarif Trump juga diposisikan sebagai kebijakan proteksi yang memberikan tekanan pada negara-negara eksportir. Kebijakan tersebut juga digunakan oleh Amerika Serikat untuk melindungi industri Amerika Serikat, namun negara seperti Indonesia hanya dapat merespons dalam bentuk penyesuaian produksi. Akibatnya, bukan hanya ekspor yang terdampak, tetapi juga rantai nilai domestik mulai dari Awak Kapal Perikanan (AKP), pekerja pengolahan, dan pekerja perikanan lainnya.

Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia berada dalam dilema, pada satu sisi bergantung pada pasar Amerika Serikat karena memiliki FOB tinggi, pada sisi lainnya semakin rentan terhadap kebijakan proteksionisme yang volatil. Tarif Trump yang diberlakukan menunjukkan ketergantungan nilai merupakan ketergantungan pada risiko. Selama struktur perikanan berorientasi ekspor tanpa proteksi memadai, perubahan kebijakan global langsung dipindahkan kepada pekerja. Oleh karenanya, tanpa mekanisme proteksi domestik yang kuat, Indonesia berada dalam posisi menerima harga, menerima standar, dan menerima risiko.

Di luar pasar Amerika Serikat, terdapat sejumlah pasar alternatif yang belum dioptimalkan strategis oleh Indonesia. Beberapa tujuan seperti Pasar ASEAN, Tiongkok, Uni Eropa, dan Timur Tengah memiliki peluang permintaan besar. Tiongkok misalnya memiliki pertumbuhan konsumsi perikanan yang stabil dan menyerap volume besar, tetapi standar mutu dan persaingan harga dengan negara eksportir lain seperti Vietnam dan Thailand membuat pasar Tiongkok Kompetitif. Sementara, Pasar Uni Eropa menawarkan nilai pasar tinggi terutama bagi komoditas yang tersertifikasi berkelanjutan. Namun, hambatan non-tarif seperti *traceability*, sertifikasi, dan standar residu menjadikan akses pasar membutuhkan kepatuhan pelaku usaha untuk menjalankan persyaratan tersebut. Namun, sayangnya pasar tersebut masih belum dioptimalisasi sebagai penyangga ekonomi perikanan.

Berdasarkan hal tersebut, *Destructive Fishing Watch (DFW)* Indonesia melakukan survei jajak pendapat terhadap 40 responden di 12 provinsi yang berasal dari berbagai latar belakang, utamanya pelaku usaha, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk melihat dampak tarif Trump terhadap ekonomi perikanan di Indonesia. Survei tersebut diturunkan melalui kerangka resiliensi ekonomi<sup>3</sup> untuk melihat dampak ekonomi di Indonesia dan respons dari responden atas tarif Trump. Dari kerangka tersebut, diturunkan menjadi dua indikator, yaitu:

## 1 Kerentanan

Diterjemahkan menjadi dampak ekonomi yang akan terjadi di Indonesia.

## 2 Resiliensi

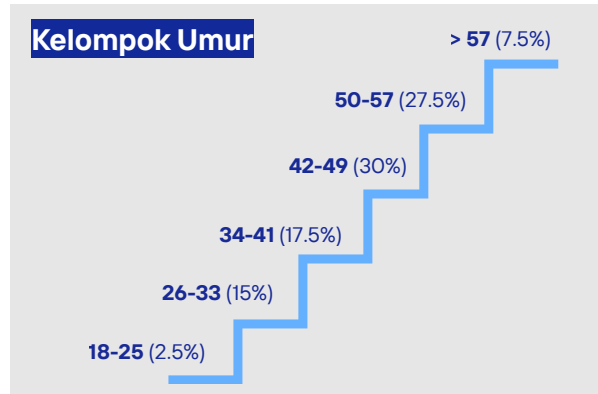
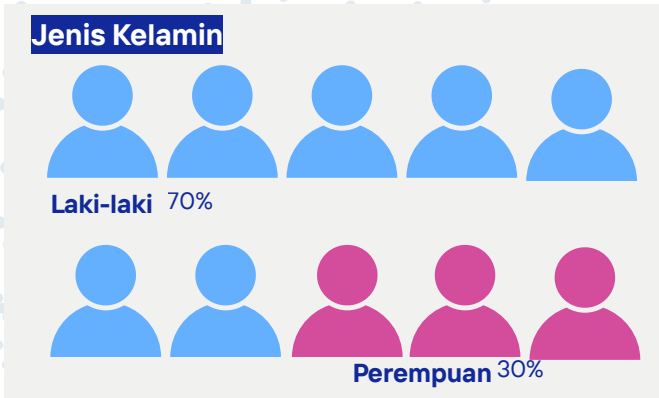
Kesiapan atas dampak yang akan terjadi.

1 *Free on Board (FOB)* adalah istilah untuk menunjukkan nilai barang dihitung sampai titik barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan keberangkatan. Hal tersebut mencerminkan harga ekspor di sisi negara asal atau nilai yang direalisasikan di hulu rantai nilai, bukan nilai akhir yang ada setelah diproses di hilir. Artinya, nilai ini belum menghitung nilai tambah pasca-ekspor baik pengolahan dan memasuki retail.

2 *Export-Oriented Industry (EOI)* merupakan model industrialisasi yang berfokus pada produksi untuk pasar global sehingga struktur produksinya mengikuti dinamika dan standar negara tujuan.

3 Lino Briguglio, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, & Stephanie Vella (2008), *Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements*, University of Malta, Islands and Small States Institute.

# KARAKTERISTIK RESPONDEN



Grafis 1. Peta Daerah Survei Dampak Tarif Trump terhadap Ekonomi Perikanan di Indonesia yang dilaksanakan DFW Indonesia

## CATATAN:

Survei terbatas dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara dalam jaringan (*daring/online*) mulai 22 Juli 2025 sampai dengan 6 Agustus 2025. Survei dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling terhadap kelompok klaster yang bersinggungan dengan isu tarif Trump dan ekonomi perikanan. Pemilihan responden dilakukan secara non-probabilistik, sehingga hasil survei tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh populasi. Survei yang dilakukan juga bersifat eksploratif deskriptif, bukan inferensial. Artinya, survei bertujuan untuk memetakan ide yang berkembang, bukan mewakili seluruh populasi secara statistik.

# IDENTIFIKASI MASALAH

## 1 Ketergantungan ekspor perikanan Indonesia terhadap pasar AS menciptakan kerentanan tinggi

**82,5%**

responden menilai produk perikanan Indonesia sangat bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat

**67,5%**

responden setuju tarif Trump memperburuk ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat



Komoditas Udang dan Tuna-Cakalang-Tongkol paling terdampak

Negara Tujuan	Volume (Ton) 2024	Nilai FOB (000 US\$)	Nilai Per Ton (US\$/Ton)
Amerika Serikat	905,5	9.834,5	10,861
Jepang	1.653,9	9.558,7	5,779
Tiongkok	2.126,0	11.439,9	5,381
Australia	292,0	1.292,4	4,426
Arab Saudi	678,8	2.695,7	3,971
Taiwan	1.578,0	5.131,9	3,252
Hongkong	947,2	2.386,3	2,519
Singapura	15.595,9	34.008,3	2,181
Malaysia	28.608,1	37.736,2	1,319

Tabel 1. Rasio Nilai Per Ton 2024 Berdasarkan Negara Tujuan

Sumber: BPS diolah oleh DFW Indonesia

Meskipun volume ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat tidak sebesar ke pasar Jepang, Tiongkok, Taiwan, Singapura, dan Malaysia, rasio nilai FOB menunjukkan Amerika Serikat justru menyerap nilai ekspor yang jauh lebih tinggi. Meskipun volume ekspor cenderung lebih rendah, namun nilai ekspor per ton di Amerika Serikat paling tinggi diantara negara tujuan lain. Hal tersebut menandakan dua hal:

1. Pasar Amerika Serikat merupakan penentu nilai, bukan sebatas pembeli; dan
2. Ketergantungan nilai menciptakan keterbatasan dalam margin dan standar daya saing.

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa volume tidak menentukan nilai, melainkan struktur permintaan dan posisi tawar pasar tujuan. Tingginya nilai FOB menegaskan pasar Amerika Serikat sebagai "pengendali nilai"

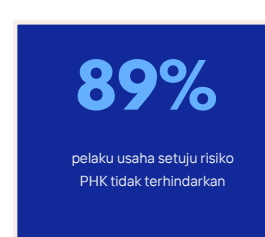
(*value setter*)<sup>4</sup> dalam rantai pasok perikanan global. Harga per ton yang lebih tinggi memungkinkan negara tujuan untuk menentukan standar mutu, spesifikasi teknis, hingga preferensi retail sebagai rujukan industri perikanan. Selain itu, ketergantungan terhadap nilai FOB tinggi menciptakan *value dependency*<sup>5</sup> (ketergantungan nilai) yang memungkinkan negara pengekspor berada pada posisi rentan terhadap kebijakan eksternal, mulai dari tarif, sertifikasi, hingga standar mutu pangan. Margin tinggi di dalam FOB memaksa negara pengekspor untuk menyesuaikan diri agar komoditasnya tetap masuk ke dalam pasar yang menawarkan nilai tertinggi.

Konsekuensi tersebut juga diakibatkan oleh industri perikanan yang berorientasi ke pasar ekspor. Industri berorientasi ekspor bertumpu pada standar nilai yang ditentukan oleh elemen eksternal, sehingga elemen produksi disesuaikan agar unit usaha tetap kompetitif. Hal tersebut menjadikan ketimpangan neraca dagang yang semakin menguntungkan Amerika Serikat, karena ketika biaya ekspor naik akibat tarif, Indonesia tidak memiliki ruang untuk mempertahankan margin. Sementara, Amerika Serikat tetap memegang nilai FOB paling tinggi. Akibatnya, Indonesia menanggung biaya produksi dan risiko pasar, sedangkan Amerika Serikat memperoleh nilai tambah di hilir (dalam kerangka FOB).

Ketergantungan nilai kepada Amerika Serikat juga bersumber dari ketiadaan pasar alternatif dengan nilai FOB yang setara dengan Amerika Serikat. Meski demikian, terdapat beberapa alternatif pasar yang mampu dijajaki, yaitu pasar ASEAN, Tiongkok, Uni Eropa, dan Timur Tengah. Pasar ASEAN dan Tiongkok dapat menyerap volume tinggi, namun memiliki persaingan biaya yang ketat. Tiongkok dan negara-negara ASEAN tidak hanya menjadi pasar tujuan, tetapi sekaligus produsen: tidak hanya pembeli, tetapi juga produsen. Sementara, Uni Eropa menawarkan nilai FOB tinggi, namun memerlukan standar tinggi utamanya menuntut kepatuhan seperti; regulasi IUU, *traceability*, standar keamanan pangan, sertifikasi keberlanjutan, dan regulasi residu. Uni Eropa memiliki peluang nilai yang besar, namun memerlukan transformasi institusional untuk memenuhi *compliance* dari negara-negara tersebut.

Pasar Timur Tengah mendorong kenaikan permintaan produk bernilai premium seperti tuna, udang, dan produk siap olah. Pasar Timur Tengah juga cenderung tidak terlalu ketat dalam sertifikasi seperti Uni Eropa dan cenderung stabil dari sisi preferensi konsumen. Namun, pasar tersebut memiliki keterbatasan terkait volatilitas geopolitik kawasan yang memungkinkan perubahan kebijakan perdagangan yang relatif cepat. Selain itu, struktur pasar Timur Tengah cenderung oligopolistik, maka kedudukan Indonesia ditentukan oleh akses hubungan dagang, bukan hanya kualitas produk. Oleh karenanya, pasar Timur Tengah dapat membuka peluang, tetapi membutuhkan hubungan diplomasi perdagangan yang lebih efektif untuk memastikan stabilitas pesanan.

## 2 Risiko PHK Pekerja Pengolahan Akibat Penurunan Produksi



Penurunan produksi komoditas perikanan akibat tarif Trump disebabkan karena orientasi produksi ditujukan untuk memenuhi standar dan permintaan pasar eksternal. Oleh karenanya, tiap intervensi dari eksternal diterjemahkan menjadi penyesuaian kapasitas produksi. Ketika permintaan turun, konsekuensi utama yang diambil oleh perusahaan berorientasi ekspor adalah pengurangan tenaga kerja. Tingginya risiko PHK yang disampaikan oleh responden dan dikonfirmasi oleh pelaku usaha menunjukkan hubungan antara pasar tujuan dan industri berorientasi ekspor bergerak secara asimetris. Dalam industri berorientasi ekspor, tenaga kerja diposisikan sebagai variabel fleksibel yang dapat disesuaikan dengan dinamika rantai nilai pasar global.

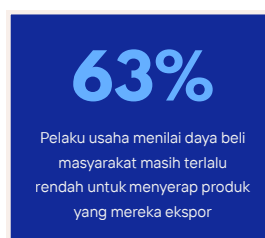
4 Dalam literatur rantai nilai global, "*value setter*" dan "*value appropriator*" menggambarkan aktor yang memiliki kekuatan menentukan harga, standar mutu, dan margin dalam rantai pasok internasional.

5 Istilah "*value dependency*" merujuk pada kondisi ketika nilai suatu komoditas lebih banyak ditentukan oleh pasar tujuan dibanding oleh struktur produksi domestik.

Dalam struktur tersebut, PHK menjadi instrumen untuk menjaga industri tetap kompetitif di bawah tekanan fluktuasi pasar. Ketika tarif menekan margin laba, perusahaan merespons dengan pengurangan kapasitas produksi dan menekan biaya tenaga kerja. Dalam konteks Sulawesi Utara, terdapat salah satu perusahaan yang merespons tarif dengan melakukan PHK terhadap 60%-80% pekerja pengolahannya. Perusahaan merespons akibat sejak awal, pendirian perusahaan tersebut ditujukan untuk ekspor ke Amerika Serikat. Dalam industri berbasis ekspor, keputusan produksi tidak ditentukan oleh dinamika domestik, misalnya konsumsi nasional atau kebutuhan tenaga kerja, melainkan perubahan nilai dan volatilitas pasar tujuan.

Dari gambaran tersebut menunjukkan ketergantungan industri terhadap pasar tunggal yang memusatkan nilai di luar negeri dan mendistribusikan risiko ke pekerja di dalam negeri. Karena nilai terpusat di luar negeri, sementara risiko diserap di dalam negeri, pasar tenaga kerja sektor perikanan sangat sensitif terhadap faktor eksternal. Oleh karenanya, dalam konteks tarif resiprokal Trump, Amerika Serikat sebagai negara pusat dengan FOB paling tinggi mempertahankan posisi sebagai *value appropriator* (penentu nilai), sementara Indonesia sebagai negara pengekspor berfungsi sebagai risk absorber (penyerap kerentanan). Maka dari itu, risiko PHK menjadi konsekuensi logis bagi pekerja karena Indonesia berada di dalam posisi rentan terhadap fluktuasi nilai yang ditentukan di luar nasional.

### 3 Substitusi Impor dan Pasar Domestik Terhambat Rendahnya Daya Beli



Meskipun pengembangan substitusi impor dan penguatan pasar domestik sering disebut sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat resiliensi ekonomi, namun temuan survei menunjukkan keduanya berada dalam limitasi struktural. Lemahnya daya beli menciptakan paradoks mendasar, yaitu Indonesia menginginkan pengurangan ketergantungan pada pasar tunggal melalui substitusi impor, tetapi basis konsumsi nasional tidak cukup kuat untuk menyerap produk dengan nilai ekspor tinggi. Produk yang selama ini diproduksi untuk pasar ekspor cenderung memiliki karakteristik harga, spesifikasi, dan standar nilai yang sulit ditarik masuk ke pasar lokal tanpa mengurangi margin laba. Akibatnya, setiap upaya pengalihan pasar justru berhadapan dengan harga domestik yang tidak dapat mengimbangi ongkos produksi. Sementara, konsumen domestik tidak memiliki kapasitas untuk membayar harga yang setara dengan nilai ekspor. Akibatnya, substitusi impor hanya mungkin terjadi pada komoditas yang bernilai rendah, bukan pada komoditas strategis yang terdampak tarif.

Pada Januari 2026, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,15%, terutama dipicu penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deflasi yang tercipta merupakan indikasi permintaan rumah tangga melemah, sehingga penurunan harga terjadi untuk menyesuaikan konsumsi yang tidak tumbuh. Dalam konteks daya beli yang stagnan, deflasi pangan mencerminkan keterbatasan kapasitas konsumen untuk menyerap barang konsumsi dasar. Jika harga pangan sebagai komponen komposisi paling esensial harus turun agar tetap terbeli, maka hal tersebut menunjukkan fondasi nasional yang rapuh. Deflasi pangan di tengah stagnasi pendapatan menandakan rumah tangga mengurangi belanja non-pangan, menunda konsumsi, atau memprioritaskan kebutuhan dasar pada tingkat minimal. Situasi tersebut menjelaskan pasar domestik tidak memiliki kapasitas serap untuk menopang diversifikasi produksi orientasi ekspor ke konsumsi nasional.

Strategi substitusi impor dalam kondisi tersebut menghadapi kendala ganda, yaitu minimnya permintaan domestik pada segmen harga tinggi yang diproduksi industri berorientasi ekspor dan ketidakmampuan produsen menurunkan harga. Deflasi dalam konteks ini bukan sebagai sinyal positif, tetapi sebagai indikator tekanan konsumsi rumah tangga yang mana permintaan tidak cukup kuat untuk mempertahankan harga pada level sebelumnya. Oleh karenanya, strategi substitusi impor membutuhkan bukan hanya pengalihan produksi, tetapi juga rekonstruksi basis konsumsi nasional, termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga

penurunan ketimpangan harga pangan, dan penguatan instrumen fiskal yang mendukung akses masyarakat terhadap produk perikanan. Tanpa perbaikan fondasi tersebut, ketergantungan terhadap pasar ekspor akan terus berlanjut, dan pasar domestik tidak akan mampu berfungsi sebagai mekanisme resiliensi saat faktor eksternal fluktuatif.

## REKOMENDASI

### 1 Memperluas dan Mempercepat Diversifikasi Pasar Ekspor

Temuan survei bahwa 97,5% responden memilih diversifikasi pasar sebagai strategi menunjukkan kesadaran terhadap ketergantungan nilai terhadap pasar Amerika Serikat. Ketergantungan tersebut menyebabkan risiko yang terkonsentrasi di negara pengekspor, di mana kebijakan dari negara tujuan ekspor langsung mengganggu stabilitas nilai, margin, dan kapasitas produksi dalam negeri. Diversifikasi pasar ekspor menjadi strategi yang tidak hanya memperluas basis konsumen, tetapi juga mendispersikan risiko nilai yang selama ini terpusat pada pasar Amerika Serikat.

Pasar seperti Tiongkok, ASEAN, Uni Eropa, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS memiliki karakteristik permintaan berbeda baik spesifikasi, skala pembelian, maupun elastisitas harga yang dapat memberi ruang bagi Indonesia untuk menegosiasikan ulang posisi tawarnya. Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah pada Januari 2026 lalu adalah menekan perjanjian bilateral dengan Jepang utamanya produk tuna-cakalang dengan tarif 0% melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Kebijakan tersebut membuka peluang bagi produk perikanan Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar Jepang yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk perikanan Indonesia. Berdasarkan FOB, Jepang juga cenderung memiliki nilai pasar tinggi yang memungkinkan Indonesia menegosiasikan ulang posisi tawarnya melalui peningkatan volume dan nilai ekspor.

Dengan demikian, diversifikasi pasar ekspor tidak hanya membuka ruang Indonesia ekspor secara kuantitas, tetapi juga mengoptimalkan pendapatan ekspor melalui produk bernilai tambah. Akses ke pasar bernilai tinggi memungkinkan negara pengekspor untuk meningkatkan *value capture* (bagian nilai yang dapat diserap secara domestik), sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat sebagai *value setter*. Maka dari itu, diversifikasi pasar tidak hanya diposisikan sebagai strategi mitigasi risiko, tetapi juga mekanisme untuk menata ulang kebijakan perdagangan agar lebih resilien dan tidak terpusat pada satu sumber nilai. Dengan memperluas akses ke pasar lainnya, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan nilai, memperkuat ketahanan industri, dan meningkatkan daya tawar dalam rantai nilai global.

### 2 Menyusun Skema Proteksi Industri dan Pekerja Selama Shock Tarif

Skema proteksi bagi industri dan pekerja dipahami sebagai instrumen stabilisasi struktural, bukan sebagai respons *ad hoc* terhadap kenaikan tarif. Temuan survei menunjukkan pekerja berperan sebagai *shock absorber*<sup>6</sup> menegaskan bahwa sektor perikanan masih beroperasi tanpa perlindungan yang memadai. Ketiadaan mekanisme tersebut membuat setiap fluktuasi eksternal langsung ditransmisikan kepada pelaku usaha dan pekerja. Oleh karenanya, proteksi dirancang sebagai jembatan tekanan jangka pendek sekaligus memperbaiki kerentanan struktural jangka panjang. Skema proteksi berbasis data dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global, sekaligus memastikan transformasi ekonomi tidak melakukan eksternalisasi risiko kepada pekerja<sup>7</sup> yang berada pada titik paling rentan di dalam rantai produksi.

Dari sisi industri, intervensi fiskal bersifat tertarget (*targeted*) menjadi salah satu instrumen fundamental untuk menjaga kelangsungan produksi. Tarif yang menekan margin membuat biaya seperti logistik, sertifikasi ekspor, dan standar *traceability* menjadi beban yang tidak lagi proporsional terhadap pendapatan. Insentif fiskal ditujukan untuk menurunkan *unit production cost* agar perusahaan tetap beroperasi tanpa mengurangi kualitas komoditas dan pekerja. Sementara, bagi pekerja, proteksi tidak hanya pada mekanisme jaminan sosial, jaminan kehilangan pekerjaan, atau jaminan kecelakaan kerja. Negara-negara yang terhubung dengan rantai pasok global menggunakan *retention schemes*, seperti *short-time work* atau subs-

<sup>6</sup> Istilah "*shock absorber*" digunakan dalam literatur ekonomi-politik pasar tenaga kerja untuk menggambarkan situasi ketika pekerja menanggung beban penyesuaian akibat fluktuasi eksternal, sementara perusahaan mempertahankan operasional dengan cara menekan biaya tenaga kerja melalui pengurangan jam kerja, pemotongan upah, atau pemutusan hubungan kerja.

<sup>7</sup> Istilah "eksternalisasi risiko" adalah proses ketika beban penyesuaian akibat guncangan ekonomi dialihkan kepada aktor paling lemah dalam rantai produksi, seperti pekerja.

idi upah untuk menjaga hubungan kerja tetap bertahan ketika permintaan turun. Bagi sektor perikanan, utamanya berbasis ekspor, mekanisme tersebut dapat menjadi alat untuk mencegah transmisi risiko secara langsung ke pekerja.

Selain itu, skema proteksi perlu dilengkapi dengan mekanisme deteksi dini untuk mengantisipasi kontraksi produksi sebelum dampaknya menjalar ke hilir. Indikator yang dapat digunakan seperti penurunan *purchase order* dari pasar tujuan, peningkatan biaya logistik, hambatan non-tarif, dan perubahan regulasi global. Melalui indikator tersebut, antar lembaga termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan pelaku usaha dapat berkoordinasi untuk menyusun langkah pengaman sebelum kontraksi terjadi. Dengan sistem deteksi dini tersebut, langkah pengamanan dapat disiapkan sebelum perusahaan mengambil opsi ekstrem seperti PHK massal atau penghentian produksi. Dalam konteks ekonomi yang terintegrasi rantai pasok global, kecepatan respons negara menjadi penentu apakah faktor eksternal dapat bertransformasi menjadi krisis sosial atau dapat diredam melalui intervensi institusional tertentu.

### **3 Memperkuat Resiliensi Ekonomi Jangka Panjang melalui Substitusi Impor dan Peningkatan Daya Beli Domestik**

Memperkuat resiliensi jangka panjang tidak hanya dilakukan dengan menggeser orientasi produksi, tetapi juga fondasi konsumsi nasional. Temuan survei menunjukkan lemahnya daya beli domestik menandakan strategi substitusi impor berada dalam limitasi struktural. Dalam kondisi tersebut, rumah tangga hanya mampu mempertahankan konsumsi dasar dan produk perikanan bernilai tinggi tidak memiliki ruang untuk terserap di pasar domestik. Oleh karenanya, penguatan daya beli ditempatkan sebagai prasyarat utama agar pasar dalam negeri dapat berfungsi sebagai penyangga industri ketika pasar global fluktuatif.

Langkah awal yang dilakukan adalah memastikan peningkatan pendapatan riil rumah tangga. Pendapatan riil yang stagnan membuat konsumsi domestik lebih banyak diarahkan pada kebutuhan minimum, bukan pada komoditas bernilai tambah. Dalam konteks tersebut, peningkatan upah, stabilisasi harga pangan, dan penguatan jaminan sosial bukan sekadar kebijakan kesejahteraan. Tetapi juga strategi ekonomi untuk menciptakan basis permintaan domestik yang cukup kuat agar industri memiliki alternatif selain pasar ekspor. Hal tersebut juga berkaitan dengan mengalihkan sebagian produksi dari orientasi FOB tinggi ke model yang dapat diserap pasar domestik. Dengan demikian, substitusi impor tidak hanya menjadi strategi defensif, tetapi mendorong industrialisasi berorientasi konsumsi nasional.

Resiliensi jangka panjang hanya dapat dicapai apabila substitusi impor diiringi oleh peningkatan daya beli domestik. Selama daya beli domestik tidak dapat memenuhi standar harga komoditas ekspor, industri perikanan akan tetap terkunci pada pasar global. Maka, membangun resiliensi berarti membangun kemandirian nilai pasar domestik yang tidak hanya mengisi celah, tetapi sebagai fondasi yang menopang keberlanjutan industri jangka panjang. Kebijakan jangka panjang tersebut diperlukan reposisi model pembangunan ekonomi di Indonesia.



## TENTANG KAMI

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi/konsorsium terbuka yang mempertemukan lembaga-lembaga dan individu-individu yang peduli terhadap praktik penangkapan ikan destruktif (DF) atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (PITRaL), IUUF, perikanan, hak asasi manusia, kemiskinan, perubahan iklim, konservasi dan bencana alam di Indonesia. Semangat aliansi ini dibangun untuk menginspirasi tanggung jawab bersama terhadap pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

DFW Indonesia dideklarasikan pembentukannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Jumat, 27 Oktober 2000. Berdasarkan amanat statuta yang ditetapkan selanjutnya, DFW-Indonesia diformalkan pendiriannya dengan akte notaris No. 2 tertanggal 19 Oktober 2003 Pendeklarasian DFW -Indonesia dilakukan oleh sejumlah lembaga dan individu-individu yang mempunyai komitmen dalam menyikapi terjadinya tindak DF dan kerusakan lingkungan ekosistem laut, dan dampak yang ditimbulkannya.



DFW Indonesia



@DFW\_Indonesia



@dfw\_indonesia



www.dfw.or.id



info@dfw.or.id



@dfw\_indonesia

Jl. Jaha No.88 ABC, East Cilandak, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12560